

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Sejak berdirinya pada tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menjadi lembaga legislatif utama dalam sistem pemerintahan Indonesia. DPR berperan sebagai representasi rakyat dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis dengan tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, yang bertugas dalam pembentukan undang-undang; fungsi anggaran, yang berkaitan dengan penyusunan dan pengawasan terhadap anggaran negara; serta fungsi pengawasan, yang memastikan jalannya pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Santoso, 2018). Dilansir dari situs dpr.go.id, DPR memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan kewenangan dalam pengawasan kebijakan pemerintah dan legislasi nasional yang terus berkembang seiring dengan dinamika politik dan sosial masyarakat. Pada awal masa kemerdekaan, DPR dibentuk dengan sistem perwakilan yang masih sangat dipengaruhi oleh sistem parlementer yang diterapkan pada saat itu. Namun, setelah berbagai perubahan sistem pemerintahan di Indonesia, DPR berkembang menjadi lembaga yang memiliki peran lebih kuat, terutama setelah era Reformasi 1998. Sejak saat itu, DPR mengalami beberapa perubahan mendasar, terutama melalui amandemen UUD 1945, yang semakin memperkuat perannya sebagai pengawas eksekutif dan pembentuk kebijakan negara (Harahap, 2020).

Dalam menjalankan tugasnya, DPR dibagi ke dalam beberapa komisi yang memiliki fokus di bidang tertentu. Salah satu komisi yang memiliki peran penting dalam sektor ekonomi dan industri adalah Komisi VI DPR RI, yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang perdagangan, perindustrian, investasi, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Situmorang, 2019). Komisi ini juga bertanggung jawab terhadap kebijakan terkait standarisasi nasional dan perlindungan konsumen, yang berperan dalam memastikan produk dan layanan yang beredar di masyarakat memenuhi standar kualitas yang baik (Putri & Nugroho, 2021).

Dilansir dari situs bumn.go.id, Komisi VI DPR RI turut mengawasi program transformasi digital BUMN agar dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing di era industri 4.0. Sejak awal pembentukannya, Komisi VI DPR RI telah berperan aktif dalam mengawal kebijakan ekonomi nasional. Peran utamanya adalah memastikan bahwa kebijakan pemerintah dalam sektor perdagangan dan industri berjalan sesuai dengan kepentingan nasional serta memberikan dampak positif bagi masyarakat luas (Purnomo, 2022).

Komisi VI bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan industri nasional dan memastikan perdagangan dalam negeri serta ekspor-impor berjalan lancar. Komisi ini berperan dalam mendukung kebijakan yang memperkuat daya saing produk lokal di pasar global serta melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat (Nasution, 2017). Dilansir dari kemendag.go.id, kebijakan Komisi VI DPR RI juga mencakup upaya dalam memperkuat regulasi perdagangan elektronik yang terus berkembang pesat di Indonesia, terutama untuk melindungi konsumen dan memastikan persaingan usaha yang sehat. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, Komisi VI juga mengawasi kebijakan terkait investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Komisi ini bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan regulasi yang menarik bagi investor serta memastikan investasi yang masuk ke Indonesia memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan membuka lapangan kerja (Hidayat, 2020). Salah satu fokus utama Komisi VI adalah pengawasan terhadap BUMN, yang memainkan peran penting dalam perekonomian nasional.

Komisi ini bertugas memastikan bahwa BUMN dikelola dengan baik, transparan, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat (Siregar, 2018). Dalam beberapa tahun terakhir, Komisi VI aktif dalam mengawasi transformasi digital BUMN serta kebijakan privatisasi dan restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak hanya itu, dalam era globalisasi dan digitalisasi, perlindungan konsumen menjadi semakin penting.

Dilansir dari ojk.go.id, peningkatan transaksi digital di Indonesia telah mendorong DPR RI untuk mengawasi kebijakan perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi di sektor e-commerce agar tidak merugikan konsumen. Selain itu, komisi ini juga mengawasi implementasi regulasi terkait perdagangan elektronik (e-commerce), yang semakin berkembang pesat (Prasetyo, 2021).

Di era modern, di mana teknologi dan ekonomi digital semakin berkembang, Komisi VI DPR RI terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada industri konvensional, tetapi juga mencakup pengembangan ekonomi digital dan keberlanjutan usaha di tengah persaingan global (Rahmawati, 2019). Dilansir dari wearesocial.com, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 185,3 juta orang, dengan 139 juta di antaranya aktif menggunakan media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa platform digital menjadi elemen kunci dalam komunikasi politik dan ekonomi. Dengan semakin kompleksnya tantangan ekonomi, Komisi VI DPR RI terus berupaya untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan (Fauzi, 2021).

2.1 Visi Misi

Visi

Dilansir dari pdiperjuangan.id, visi Fraksi PDI Perjuangan DPR RI adalah mewujudkan amanat penderitaan rakyat sesuai cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, menjaga dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar negara, serta mengantarkan Indonesia menjadi negara yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

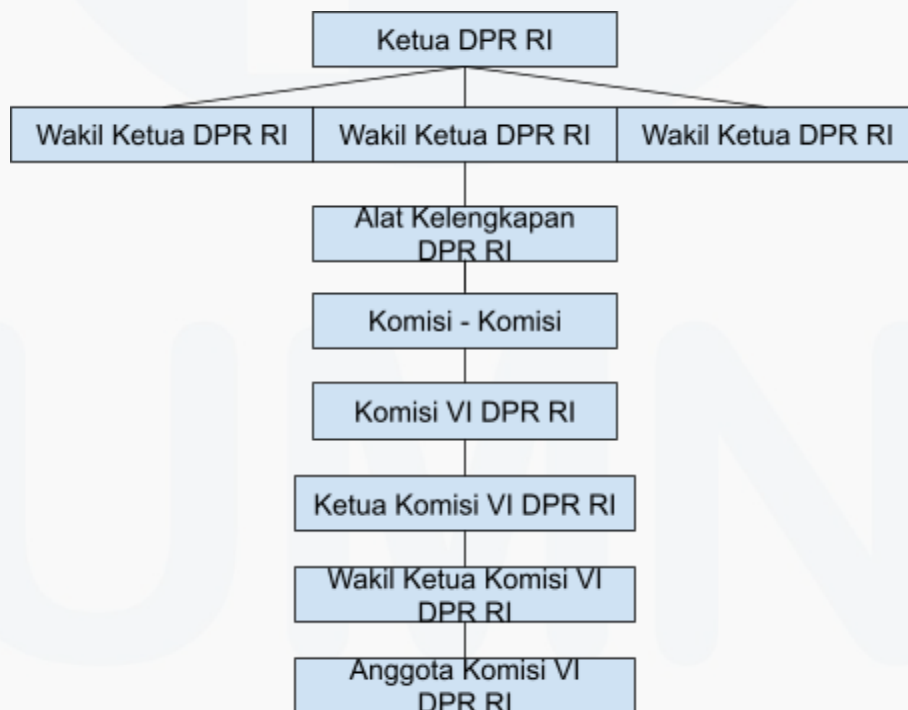
Misi

Dilansir dari pdiperjuangan.id, adapun misi dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- 2) Membangun masyarakat yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- 3) Memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan pro-rakyat.

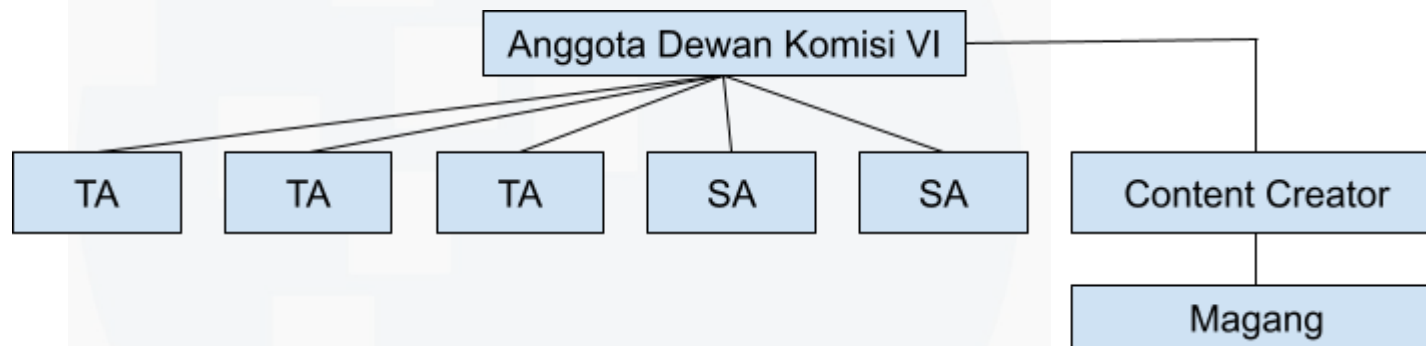
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

DPR RI adalah lembaga legislatif dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Komisi VI DPR RI berfokus pada perdagangan, perindustrian, investasi, dan BUMN. Berikut struktur organisasi DPR RI dan Komisi VI DPR RI :



Gambar 2.1

Sumber : Olahan Penulis



Gambar 2.2

Sumber : Olahan Penulis

Indonesia (DPR RI) adalah lembaga legislatif yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk memastikan tugasnya berjalan efektif, DPR RI memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Ketua DPR RI yang saat ini dijabat oleh Puan Maharani, serta dibantu oleh tiga Wakil Ketua DPR RI, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar. Di bawah kepemimpinan tersebut, terdapat alat kelengkapan DPR RI, termasuk komisi-komisi yang bertanggung jawab dalam berbagai bidang pemerintahan. Salah satu komisi yang memiliki peran strategis adalah Komisi VI DPR RI, yang menangani sektor perdagangan, perindustrian, investasi, dan pengelolaan BUMN.

Komisi VI ini dipimpin oleh Anggia Erma Rini sebagai Ketua Komisi VI DPR RI, dengan didampingi oleh empat Wakil Ketua, yaitu Adisatrya Suryo Sulisto, Nurdin Halid, Andre Rosiade, dan Eko Hendro Purnomo. Untuk menjalankan tugasnya secara efektif, Komisi VI DPR RI terbagi ke dalam beberapa subkomisi, yaitu Subkomisi Perdagangan & Perindustrian, Subkomisi Investasi, Subkomisi BUMN, serta Subkomisi Standarisasi & Konsumen, yang masing-masing bertanggung jawab dalam mengawasi dan merumuskan kebijakan sesuai dengan bidangnya.

Sebagai salah satu anggota Komisi VI DPR RI, Prof. Darmadi Durianto memiliki tim yang membantu dalam menjalankan tugasnya. Tim ini terdiri dari Tenaga Ahli (TA), Staf Administrasi (SA), serta Content Creator (CC) yang bekerja sama untuk memastikan efektivitas kerja dalam mendukung fungsi legislatif dan komunikasi publik.

1) Tenaga Ahli (TA)

Tenaga Ahli berperan dalam memberikan analisis, riset, serta kajian strategis terhadap berbagai kebijakan yang dibahas di Komisi VI. Mereka bertugas membantu penyusunan bahan rapat, memberikan masukan dalam perumusan kebijakan, serta memastikan setiap keputusan yang diambil berbasis data dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta sektor ekonomi nasional.

Anggota Tenaga Ahli dalam tim Prof. Darmadi Durianto adalah:

- Dewantara
- Venny Sufendi Dharmadi
- Haryanto

2) Staf Administrasi (SA)

Staf Administrasi bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen, jadwal, serta berbagai kebutuhan administratif yang mendukung kelancaran kerja Prof. Darmadi Durianto. Mereka berperan dalam mengatur agenda rapat, mengelola komunikasi internal dan eksternal, serta membantu dalam dokumentasi kerja legislatif.

Anggota Staf Administrasi dalam tim Prof. Darmadi Durianto adalah:

- Lisa Amalia
- Gianita Santika Sutrisno

3) Content Creator (CC)

Content Creator memiliki peran krusial dalam membangun citra serta menyebarkan informasi terkait kerja legislatif Prof. Darmadi Durianto kepada masyarakat. Mereka bertanggung jawab dalam menyusun strategi komunikasi digital, membuat konten publikasi, serta mengelola berbagai platform media sosial untuk meningkatkan engagement dengan publik. Posisi Content Creator dipegang oleh Cannovaro Ot'neil Setiawan, yang mengawasi seluruh aspek kreatif dan digital marketing dalam tim.

Selain tim inti tersebut, terdapat juga anak magang yang bekerja di bawah supervisi Content Creator untuk membantu dalam produksi konten, pengelolaan media sosial, serta berbagai tugas lain yang mendukung kinerja komunikasi publik.